

ANALISIS SISTEMATIS RISET TATA KELOLA UMKM DAN RELEVANSI PADA AGENDA PENELITIAN MENDATANG

Ahmad Sumiyanto

Prodi Kewirausahaan Universitas Amikom Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author: ahmadsumiyanto@amikom.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Tata Kelola, UMKM, Analisis Sistematis dan Kinerja UMKM

Received : 3 November 2025

Revised : 10 November 2025

Accepted: 17 November 2025

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tata kelola UMKM berdasarkan artikel-artikel yang telah diterbitkan sebelumnya. Studi literatur berdasarkan database Scopus dari tahun 1995 hingga 2024 dilakukan dengan menggunakan alat VOSviewer untuk menganalisis data yang dikumpulkan untuk analisis bibliometrik. Temuan menunjukkan tata kelola UMKM dan diperlukan dukungan dan komitmen pemerintah dan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memberikan bantuan bagi para pelaku UMKM. Untuk dapat bertahan dari krisis, perlu peningkatan lingkungan internal seperti modal, sumber daya manusia (SDM) dan adopsi teknologi informasi. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang paling banyak digunakan pada riset terdahulu dan wawancara terstruktur mendalam tersebar merata di negara berkembang dan maju. Tema utama masih dibagi menjadi masalah tata kelola perusahaan dan tata kelola UMKM. Secara umum, praktek corporate governance yang baik menjadikan perusahaan memiliki kinerja yang lebih baik, kegagalan usaha kecil dan menengah adalah hasil dari praktek corporate governance yang lemah. Tata kelola perusahaan memang bukan merupakan solusi untuk semua masalah yang dihadapi UMKM, namun tata kelola adalah hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi untuk mencapai suatu kesuksesan bisnis.

©2025 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](#).



PENDAHULUAN

Peranan UMKM sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga pada negara-negara maju (Resmi et al., 2022). UMKM terbukti berperan sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran serta berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan perekonomian. Pada era kompetisi global, UMKM diharapkan mampu memberikan nilai tambah lebih banyak pada barang atau jasa yang ditawarkan, baik secara kualitas (yang lebih baik) atau efisien (lebih tepat guna) dibandingkan pesaing (Yáñez-Araque et al., 2021). Hal ini secara spesifik sulit dilakukan oleh UMKM karena minimnya kemampuan manajemen dan pengelolaan modal kerja yang terbatas (Resmi et al., 2021). Kondisi saat ini UMKM mengalami berbagai permasalahan seperti terjadinya penurunan penjualan, kendala akses permodalan, terhambatnya distribusi, kesulitan bahan baku, produksi menurun dan pemutusan hubungan tenaga kerja, hal ini menjadi ancaman bagi perekonomian nasional (Suyatmi & Pahlevi, 2021). UMKM sebagai penggerak ekonomi domestik dan penyerap tenaga kerja menghadapi penurunan produktivitas yang berakibat pada penurunan profit secara signifikan, terlebih lagi saat era pandemi covid (Dewi & Mahendrawathi, 2019).

UMKM memiliki daya tahan terhadap gejolak perekonomian. Namun Covid-19 telah membawa kembali krisis perekonomian Indonesia dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibanding krisis 1997-1998 (Dewi & Mahendrawathi, 2019). Digitalisasi merupakan suatu yang harus dilakukan. Karena dalam masa pembatasan ini para UMKM membutuhkan bantuan teknologi digital untuk tetap menunjang pengembangan kegiatan operasional UMKM (<https://aptika.kominfo.go.id>). Ternyata, salah satu masalah yang muncul adalah belum adanya kesiapan secara fundamental dan mental bagi para pelaku UMKM, notabene sebagian besar perusahaan masih mengelola usahanya secara konvensional dan belum mengimplementasikan pedoman *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan. Secara umum, praktek *corporate governance* yang baik menjadikan perusahaan memiliki kinerja yang lebih baik, kegagalan usaha kecil dan menengah adalah hasil dari praktek *corporate governance* yang lemah. Tata kelola perusahaan memang bukan merupakan solusi untuk semua masalah yang dihadapi UMKM, namun tata kelola adalah hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi untuk mencapai suatu kesuksesan bisnis (Vásquez et al., 2021).

Lingkungan bisnis saat ini telah berubah secara radikal dan sangat berbeda dibanding masa lalu. Persaingan ketat terjadi dalam lingkungan yang terus menerus mengalami perubahan cepat dalam kurun waktu singkat (Driss et al., 2021). Kecepatan dan pendeknya periode perubahan lingkungan menyebabkan

perusahaan tidak mudah melakukan antisipasi untuk menghindari kegagalan. Perusahaan yang ingin bertahan dan lebih maju dalam kondisi demikian, perlu untuk membangun strategi baru dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) pada umumnya memiliki keterbatasan dalam pengendalian sumber daya, survei pasar, dan perencanaan strategi yang masih rendah (Li et al., 2020).

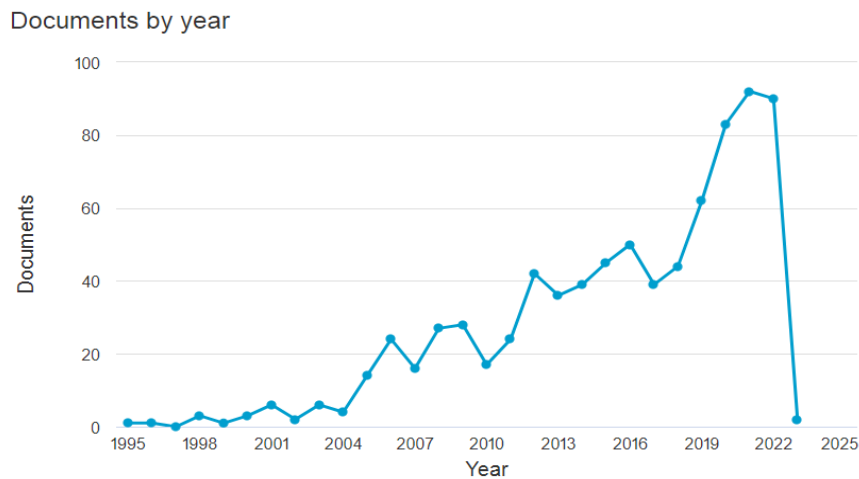
Kelemahan dan tantangan UMKM di Indonesia sebagai penghalang daya saing usaha yaitu kurangnya modal, sumber daya manusia yang terbatas, lemahnya jaringan usaha, iklim usaha yang tidak kondusif, terbatasnya sarana prasarana, dan terbatasnya akses pasar (Imamah et al., 2019). Kondisi ini mendorong betapa pentingnya investasi untuk mengembangkan sumber daya agar sejalan dengan penerapan strategi dalam menciptakan keunggulan bersaing serta meningkatkan kinerja perusahaan.

Menyikapi persaingan yang semakin ketat ini, UMKM perlu meningkatkan kemampuan bersaing secara global dengan merumuskan strategi adaptif serta mudah disesuaikan untuk mengikuti perkembangan perubahan yang terjadi. Hal ini sesuai dengan konsep pandangan berbasis sumber daya (*resource based view*), dimana perusahaan mampu mengembangkan keunggulan kompetitif dengan menciptakan nilai dengan bentuk dan cara yang unik dan tidak dapat ditiru oleh pesaing. Keunggulan kompetitif dapat diciptakan jika perusahaan dapat secara efektif menugaskan manajemen perusahaan dengan tugas-tugas penting untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mendayagunakan sumber daya strategisnya untuk memaksimalkan pendapatan (Chen & Yu, 2021).

Keunggulan kompetitif berkelanjutan dalam lingkungan persaingan bisnis modern yang dinamis dan tidak dapat diprediksi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan pada umumnya. Perusahaan perlu menerapkan strategi yang fleksibel terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi untuk dapat meraih keunggulan kompetitif tersebut (Vásquez et al., 2021). Perusahaan harus memiliki kapabilitas untuk menciptakan keunggulan kompetitif dengan sumber daya yang terbatas. Selain itu, kemampuan adaptasi perusahaan terhadap dinamika perubahan pasar dan berbagai macam kebutuhan pelanggan mutlak diperlukan perusahaan (Anwer et al., 2021)

Penelitian ini menganalisis artikel ilmiah untuk memetakan penelitian tata kelola UMKM secara internasional mengenai tema, lokasi, subjek penelitian, dan metode. Isu mengenai penerapan good governance pada UMKM masih menjadi perdebatan. Penelitian terdahulu telah dilakukan di beberapa Negara. Perdebatannya adalah mengenai bagaimana norma dan aturan *governance* yang sesuai. Pada kasus hasil penelitian Indonesia, *good governance* pada UMKM relatif baru dan masih sedikit mendapat perhatian. Dengan semakin kuat penerapan

prinsip tata kelola atas aspek transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan serta kewajaran, maka semakin efektif mekanisme governance diterapkan. Sehingga untuk dapat bertahan dari pandemi saat ini, perlukah pelaku usaha UMKM menerapkan tata kelola?



Gambar 1. Jumlah Publikasi Tata Kelola UMKM

Sumber: Elaborasi penulis berdasarkan Data Scopus

Kajian ini memberikan wawasan mengenai sebaran penelitian tata kelola UMKM di beberapa negara, tahun, tema, metode, dan hubungan antar tema yang telah dikembangkan. Penelitian ini mencoba untuk mengisi kesenjangan bahwa penelitian yang berkaitan dengan tinjauan pustaka masih sedikit dilakukan. Penelitian tentang tata kelola UMKM mendapat perhatian yang signifikan dari tahun ke tahun. Semakin banyaknya riset tata kelola UMKM membuka peluang perluasan tema-tema baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian, metode penelitiannya masih didominasi oleh survei. Metode survei dipilih karena dapat mengakomodir tujuan peneliti dan sesuai dengan tema yang diangkat oleh penelitian terbaru. Sedangkan untuk eksperimen, masih sangat sedikit penelitian tentang tata kelola UMKM. Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan, dari tahun 1995 hingga 2022, terjadi peningkatan penelitian tentang tata kelola UMKM, dengan berbagai tema.

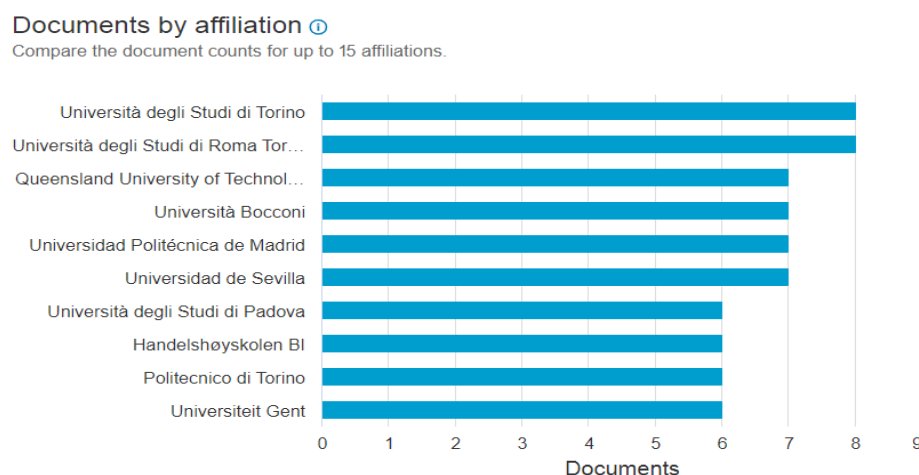
Tahapan dari metodologi penelitian ini yaitu mengumpulkan, menerjemahkan, memproses dan menganalisis artikel ilmiah. Kemudian, mengelaborasi hasil dari pemrosesan data, menganalisa artikel ilmiah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Terakhir, pembahasan mengenai hasil dari analisa sistematis yang menghasilkan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya kedepannya. Analisa sistematis ini menggunakan teknik bibliometrik yang telah digunakan sebelumnya. Pada proses akhir, artikel ilmiah yang dijadikan analisis adalah sebanyak 807 artikel ilmiah. Langkah selanjutnya, penginputan data atau

pendokumentasian sistematis pada 807 artikel ilmiah tersebut, berdasarkan setiap aspek yaitu, teori yang digunakan pada penelitian, metodologi penelitian, dan research setting, serta tema peneltian. Langkah terakhir yaitu pemrosesan dan analisa artikel ilmiah. Untuk melakukan ini, peneliti menggunakan VOSviewer untuk memvisualisasikan hasil dari penelitian dan menganalisis hubungan antara kata kunci satu dan lainnya. Kemudian, hasil dari visualisasi tersebut dibahas untuk menjawab pertanyaan penelitian.

PEMBAHASAN

Bagian ini akan fokus pada distribusi artikel dan aspek yang berpengaruh dari tata kelola UMKM. Distribusi laporan didasarkan pada publikasi tahunan dan jumlah artikel yang diterbitkan oleh sumber jurnal. Bagian penting dari tata kelola UMKM akan menampilkan aspek yang paling produktif berdasarkan bidang studi, penulis, institusi, dan negara.

Pada bagian ini, hasil dari 807 artikel terpilih menjawab dua pertanyaan penelitian yang mengacu pada setting penelitian (tema, subjek, dan lokasi pelaksanaan penelitian), metodologi penelitian, dan kluster tema penelitian. Sumber teratas di bidang tata kelola UMKM menurut Afiliasinya disajikan pada gambar 2. Selanjutnya, penelitian tentang tata kelola UMKM terutama menyebar dari beberapa negara, seperti terlihat pada gambar 3, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jerman, Cina, Italia, dan Kanada. Sebaliknya, negara berkembang adalah India dan Indonesia. Lokasi percakapan ini menyoroti pentingnya governance atau tata kelola pada UMKM.



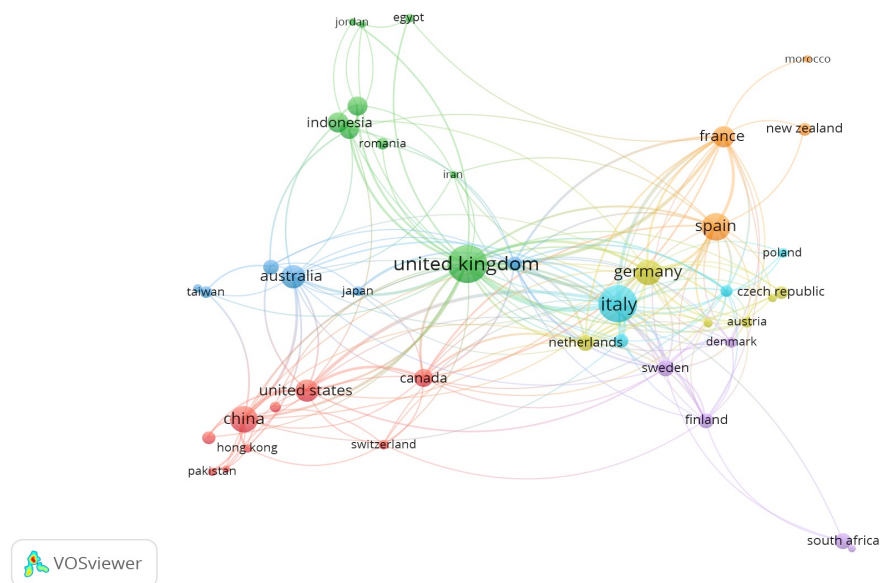
Gambar 2. Jumlah Artikel Menurut Afiliasi (Sepuluh Besar Institusi)

Sumber: Elaborasi penulis berdasarkan Data Scopus

Pada kasus hasil penelitian di Indonesia, good governance pada UMKM relatif baru dan masih sedikit mendapat perhatian. salah satu riset terbaru menjelaskan bahwa berjalannya mekanisme good governance pada UMKM yang

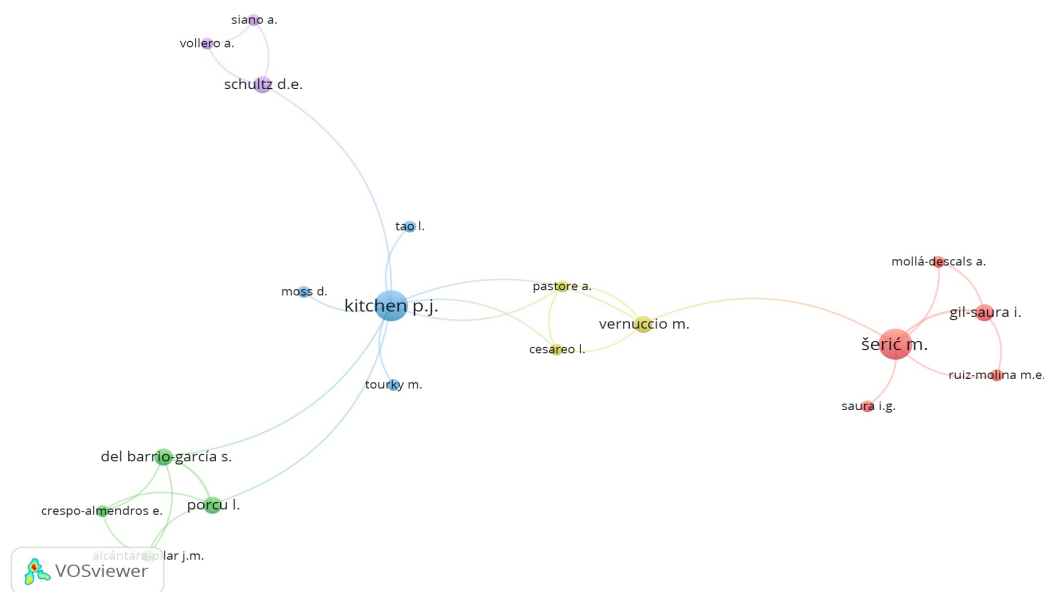
efektif ditandai dengan tingginya penerapan semua prinsip good corporate governance. Tata kelola UMKM tidak banyak dikontrol oleh pihak lain seperti perusahaan besar termasuk aturan UU terkait dengan penerapan corporate governance, sehingga penerapan ini merupakan komitmen moral dan bentuk pertanggung jawab pengelola.

Selanjutnya mapping co-occurrence negara menunjukkan kontribusi masing-masing negara di bidang penelitian. Untuk membuat gambar menjadi transparan, makalah ini menganalisis hasil pencarian dari database scopus menggunakan. Setelah menyesuaikan ukuran node, ukuran font label, dan posisi node, peta co-occurrence negara (database Scopus) ditunjukkan pada Gambar 3. Pada Gambar 3, ukuran node mewakili jumlah literatur untuk negara tersebut. Semakin banyak literatur yang ada, semakin besar radius node untuk negara tersebut. Inggris adalah negara yang paling didokumentasikan dan berpengaruh, diikuti oleh Amerika Serikat, China dan Italy.



Gambar 3. Country co-occurrence Analysis
Sumber: VOSviewer software

Berdasarkan software VOS viewer, analisis co-authorship dibagi menjadi unit analisis yaitu, penulis, dan institusi. Analisis rekan penulis juga mengungkapkan hasil penulis, afiliasi, dan negara yang paling produktif seperti yang disajikan pada gambar sebelumnya. Namun demikian, penelitian ini hanya berfokus pada analisis penulis bersama. Hasilnya menunjukkan 149 penulis, namun berdasarkan VOSviewer, sebagian besar dari mereka belum terhubung. Hanya 18 penulis yang memiliki set item terhubung terbesar di antara mereka seperti yang disajikan pada Gambar 4. Gambar 4 menunjukkan hubungan antara 18 penulis.

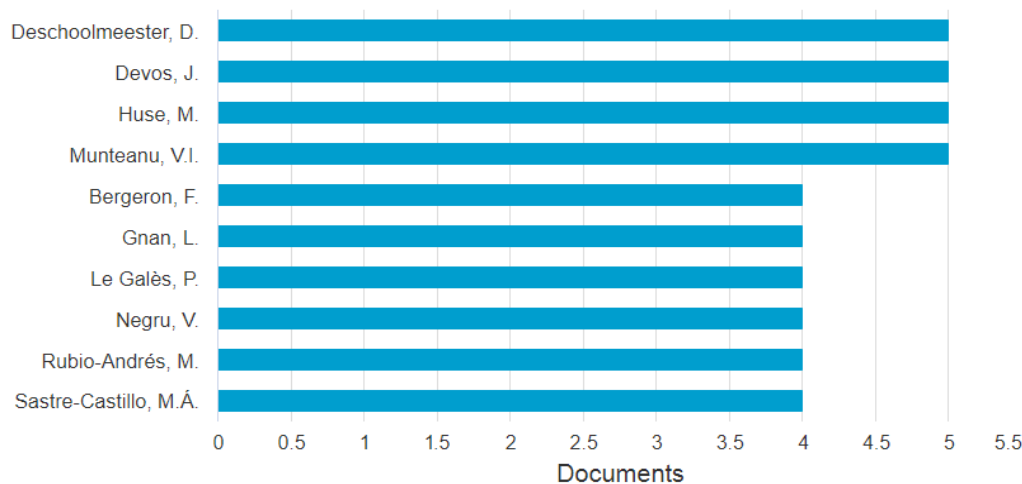


Gambar 4. Co-Authorship Analysis Of Authors
Sumber: VOSviewer software

Gambar 5 menunjukkan penulis paling produktif dalam tata kelola UMKM. Tabel ini hanya didasarkan pada jumlah publikasi

Documents by author

Compare the document counts for up to 15 authors.



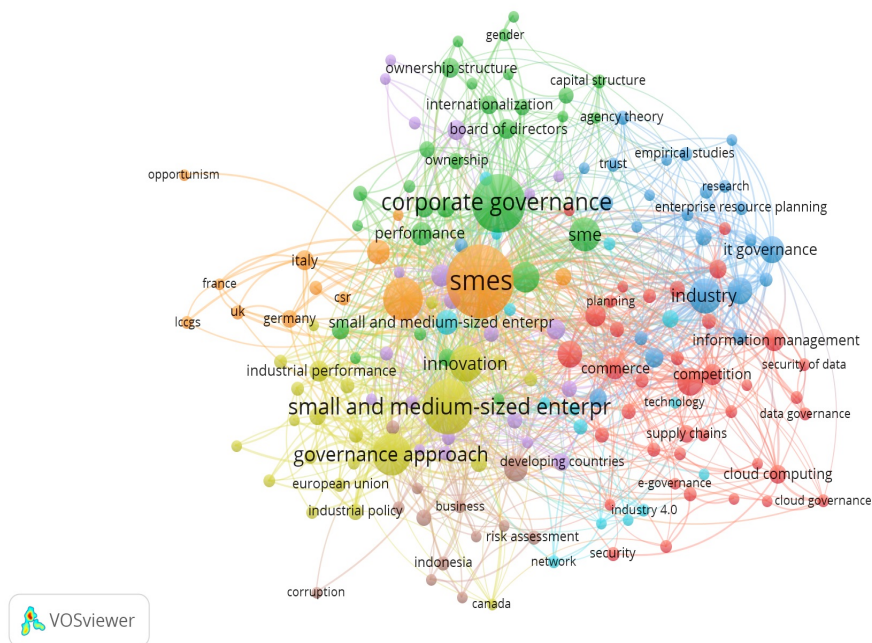
Gambar 5. Articles by author (Sepuluh Besar Institusi)

Sumber: Elaborasi penulis berdasarkan Data Scopus

Mengikuti kriteria yang disebutkan sebelumnya, sampel akhir mencakup 807 dokumen (analisis per 1 September 2022), menggunakan pendekatan bibliometrik yang mempelajari judul dan abstrak dari setiap sumber. Sehingga dapat membantu peneliti menerapkan analisis bibliometrik yang mendukung penelitian yang akurat

dengan kutipan dan kutipan, negara penerbit dan penulis utama untuk alur penelitian ini. terakhir, untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas, peneliti juga menggunakan software vosviewer. alat terakhir ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari hubungan antar kata kunci, mendukung pemetaan topik ilmiah yang sedang dibahas oleh peneliti. langkah ini penting untuk memberikan agenda penelitian terstruktur untuk penelitian lanjutan.

Peneliti menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk memvisualisasikan kelompok potensial di setiap kata kunci dari artikel yang diulas. Pertama, peneliti mengidentifikasi 4 cluster utama berdasarkan perbedaan warna (hijau, ungu, biru, dan merah) untuk setiap topik yang muncul pada diagram. Perbedaan warna menggambarkan topik hubungan/analisis yang saling berhubungan. Kemudian, node tersebut mengidentifikasi seberapa sering topik tersebut digunakan (tata kelola UMKM).



Gambar 6. Network Visualization Tata Kelola UMKM

Berdasarkan 807 artikel yang diteliti, penelitian ini mengklasifikasikan menjadi 4 cluster, yaitu cluster hijau, ungu, biru, dan merah. Cluster hijau, tema yang saling terkait adalah small medium enterprise, governance, innovation, Cluster ungu tema yang saling terkait adalah IT governance, enterprise resource planning. Cluster biru tema yang saling terkait adalah board of director, ownership structure, agency theory. Cluster merah tema yang saling terkait adalah cloud governance, technology, information management dan revolusi digital.

Penelitian tentang implementasi GCG pada perusahaan besar dan perusahaan go-public sudah cukup banyak dengan konteks negara luar negeri

maupun di Indonesia, namun investigasi GCG pada UMKM sangatlah terbatas (Azmi et al., 2019). Pentingnya penerapan good governance dalam bisnis pada skala manapun dibutuhkan dalam kerangka konsep sustainability. Lebih lanjut konsep sustainability ini kemudian menjadi dasar bagi berkembangnya suatu usaha. Logika sederhana dapat menjelaskan bahwa Perseroaan yang telah mapan, awalnya mungkin dibentuk oleh seorang atau beberapa wirausahawan mulai dari skala kecil atau menengah. Isu mengenai penerapan good governance pada UMKM masih menjadi perdebatan (Chen & Yu, 2021). Penelitian terdahulu telah dilakukan di beberapa Negara. Perdebatannya adalah mengenai bagaimana norma atau aturan governance yang sesuai. Pada kasus hasil penelitian di Indonesia, good governance pada UMKM relatif baru dan masih sedikit mendapat perhatian. Salah satu riset terbaru menjelaskan bahwa berjalannya mekanisme good governance pada UMKM yang efektif ditandai dengan tingginya penerapan semua prinsip good corporate governance (Erragragui & Revelli, 2016).

Tata kelola UMKM tidak banyak dikontrol oleh pihak lain seperti perusahaan besar termasuk aturan UU terkait dengan penerapan corporate governance, sehingga penerapan ini merupakan komitmen moral dan bentuk pertanggung jawab pengelola sebagai khalifatullah untuk menjaga alam dan memberikan manfaat terhadap sesama manusia (Imamah et al., 2019). Apabila aktivitas bisnis dalam kerangka Islamic Corporate Governance dilakukan dengan prinsip shiddiq, amanah, tabligh, fathanah, istiqamah, qanaah, maka akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan kesejahteraan semua pemegang kepentingan (stakeholders).

Model penerapan Islamic Corporate Governance (ICG) pada UMKM yang berorientasi Social entrepreneurship terbukti dapat meningkatkan kinerja UMKM dan kesejahteraan karyawan. Namun demikian hal ini masih menyisakan masalah karena model ini tidak efektif untuk UMKM yang berbasis bahan baku lokal dan membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Hal ini dimungkinkan karena sebelumnya tidak fokus pada UMKM tertentu yang menggunakan salah satu model social entrepreneurship. Kondisi tersebut dapat menjadikan ketidak efektifan model tersebut. Model Penerapan Islamic Corporate Governance (ICG) pada UMKM terbentuk setelah dilakukan pengujian terhadap berbagai dimensi dan skenario hubungan yang dapat efektif meningkatkan kinerja UMKM dan kesejahteraan karyawan yang pada akhirnya peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi dimensi Islamic Corporate Governance (Shiddiq, Amanah, Fathonah, Tabligh, Istiqomah dan Qonaah) merupakan bentuk tata kelola perusahaan yang menekankan pada self control dalam implemenasinya (Jan et al., 2021).

Model tata kelola ini diharapkan efektif dalam pengelolaan UMKM, dimana pengelola yang juga merupakan pemilik usaha tidak ada kontrol eksternal dalam bentuk komisisaris atau rapat umum pemegang saham (Qoyum et al., 2021). Pertanggungjawaban lebih menekan tanggung jawab moral dan sosial dalam pengelolaan usaha. Kondisi ini yang menjadikan pentingnya Islamic corporate

governance dalam pengelolaan UMKM. Efektifitas dan keberhasilan model ini ditunjukkan dengan peningkatan kinerja UMKM (peningkatan penjualan, laba maupun ROA), kesejahteraan stakeholder terutama karyawan dan masyarakat yang ada disekitar (Safiullah, 2021).

Dalam islamic corporate governace, Shiddiq mencerminkan perilaku dalam pengelolaan perusahaan yang dilandasi prinsip-prinsip kebenaran, kejujuran, ketaqwaan yang berorientasi pada nilai, berani tegar, sabar, bijaksana dan ikhlas. Kejujuran dan kebenaran juga disebut fairness, yaitu pemberian kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mendapat informasi yang relevan dari perusahaan (Safiullah et al., 2020). Prinsip Shiddiq pada UMKM akan dilihat dari bagaimana kejujuran, keadilan dan integritas para pengelola dalam mengelola usahanya. Amanah artinya dapat dipercaya, dalam tata kelola perusahaan islami amanah merupakan kesetiaan dan komitmen perilaku pengelola perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya (Srairi, 2019).

Agar tata kelola berjalan dengan baik sesuai prinsip amanah, maka pelaku bisnis harus memiliki akhlaq yang baik, hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban (responsibility) dari pemegang amanah tersebut (Kok & Filomeni, 2020). Sebagai pengelola/pemilik perusahaan harus mampu mengelola hartanya secara benar sesuai dengan cara dan tujuan syariah yang ditetapkan, tidak hanya karena keuntungan, tetapi juga harus dapat mencari kekayaan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Allah.

Fathanah merupakan bentuk Islamic Corporate Governance yang memiliki makna sebagai kepemilikan sifat intelektual, kecerdikan atau kebijaksanaan. Bahwa keahlian (kecerdasan) tersebut luas baik menyangkut intelektual, emosional maupun spiritual. Kecerdasan komprehensif tersebut sangatlah diperlukan untuk mengelola bisnis secara profesional (Tarazi & Abedifar, 2020). Tabliq merupakan bentuk Islamic Corporate governance yang memilki makna komunikatif dan argumentatif. Pengelola perusahaan/UMKM yang memiliki sifat tabligh, akan mengkomunikasikan informasi kepada pihak yang berkepentingan dengan benar dan santun, baik tentang tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya. Setiap kegiatan manajemen selalu dilakukan dengan tranparan, sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) (Almaqtari et al., 2021).

Istiqamah dalam Islamic Corporate Gocernance merupakan sikap konsisten dari pribadi muslim yang profesional dan berakhlak, yaitu kemampuan untuk bersikap secara taat asas, pantang menyerah, dan mampu mempertahankan prinsip serta komitmennya. Pribadi yang mampu mengendalikan diri dan mengelola emosinya secara efektif. Sikap konsisten tersebut telah melahirkan kepercayaan diri yang kuat dan memiliki integritas serta mampu mengelola stres dengan tetap penuh gairah. Istiqamah merupakan keteguhan pendirian dalam membela kebenaran.

Keteguhan tersebut diwujudkan dalam bentuk keteguhan memegang janji, konsekuen serta konsisten pada niat melakukan kebenaran yang telah disepakati (Ahmadi et al., 2019). Manajemen perusahaan yang memiliki sifat istiqamah akan teguh memegang janji dari Sang pemberi amanah (stakeholder). Tata kelola perusahaan islami dari prinsip qana'ah, menunjukkan bahwa pengelola cukup berupaya melakukan aktivitas yang terbaik dan yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan usahanya, walaupun dalam pengelolaan masih ada kurang efisien (Alam et al., 2020).

Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks dan terjadinya berbagai kasus fraud pada perusahaan modern, mendorong para pelaku bisnis untuk menghadirkan suatu mekanisme pengelolaan perusahaan yang baik dan mampu menjamin terlaksananya komitmen-komitmen yang telah disepakati oleh seluruh pihak yang menjalankan hubungan bisnis. Di dunia internasional, sistem tersebut dikenal dengan istilah Corporate Governance. Di Indonesia sendiri penyebutan Good Corporate Governance (GCG) lebih populer digunakan.

Sebelum tahun 1997, penelitian mengenai tata kelola perusahaan di seluruh dunia sangat minim dilakukan. Namun, krisis yang melanda pasar keuangan dan ekonomi negara-negara Asia pada tahun 1997 dan kegagalan beberapa perusahaan terkenal (misalnya Enron, WorldCom dan Parmalat) yang telah terjadi dalam 20 tahun terakhir, menimbulkan pertanyaan tentang pentingnya penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, minat dalam tata kelola perusahaan telah tumbuh dan menarik perhatian besar akademisi dan pengambil keputusan kebijakan publik di negara maju dan berkembang. Tata kelola perusahaan juga telah berubah secara nyata menjadi hal penting perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan juga menjadi kunci untuk mengembangkan ekonomi pada suatu negara

Peranan Usaha Kecil Menengah (UMKM) sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga pada negara-negara maju. UMKM terbukti berperan sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran serta berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan perekonomian (Fatmawati et al., 2020). Namun berkembang tidaknya UMKM pada era perdagangan bebas dan krisis pandemi misalnya, tergantung pada daya saing dan peningkatan efisiensi serta kekuatan jaringan bisnis dengan lembaga lainnya. Dengan demikian permasalahan yang terjadi bagaimanakah tata kelola usaha UMKM sistem Syariah dijalankan. Tujuan dalam kegiatan bisnis UMKM tidak lepas dari sistem keuangan karena bagaimanapun antara pasar uang dan pasar riil saling terkait dan saling membutuhkan. Akan terjadi transaksi baik sebagai nasabah maupun sebagai yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnis UMKM (Chen & Yu, 2021).

Urgensi membangun UMKM berbasis Syariah memiliki tujuan mulia. Pertama, sebagai bentuk ketaatan menjalankan syariat Islam. Kedua, membangun kemajuan ekonomi bangsa, mengingat permintaan terhadap produk halal dunia

semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk mengembangkannya maka diperlukan tata kelola UMKM berbasis Syariah seperti penerapan pedoman atau prinsip-prinsip *corporate governance* dalam operasionalnya (Kok & Filomeni, 2020).

Pedoman Tata kelola perusahaan atau *corporate governance* merupakan sebuah pedoman pokok bagi organisasi atau sebuah perusahaan dalam setiap pengembangan perusahaan. Definisi tata kelola perusahaan secara luas merupakan seperangkat tata hubungan antara pihak manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan atau stakeholders lainnya yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan (Tarazi & Abedifar, 2020). Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas tata kelola perusahaan atau *corporate governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Pedoman tata kelola perusahaan atau *corporate governance* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran atau kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Dewi & Mahendrawathi, 2019).

Tata kelola perusahaan perspektif Islam harus didasarkan pada nilai prinsip keadilan dengan semua pemangku kepentingan. Adapun dari sisi akademis, isu *corporate governance* muncul berkaitan dengan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik perusahaan) dan agen (manajemen perusahaan). Berdasarkan asumsi teori agensi terjadi tarik menarik kepentingan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen, dimana manajemen perusahaan diasumsikan melakukan pekerjaan atas dasar kepentingan pribadi (*self interest*) Hal ini kemudian memunculkan permasalahan agensi berupa asimetri informasi yang diciptakan dan dapat dimanfaat oleh pihak manajemen untuk melakukan kecurangan atau manipulasi yang tentunya akan merugikan pemilik perusahaan yang dalam hal ini adalah pemegang saham (Ararat et al., 2021). Atas dasar itu kemudian diperlukan mekanisme *corporate governance* untuk mengatur hubungan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen (Ahmadi et al., 2019). Perspektif keagenan dalam perkembangannya dan kegiatan pelaksanaan *corporate governance* dianggap kurang memadai karena hanya melibatkan hubungan yang sempit antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen, yang secara kasat mata cenderung mengabaikan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Berawal dari hal ini, maka perspektif teori stakeholder mulai diimplementasikan pada *corporate governance* (Kok & Filomeni, 2020). Perspektif teori stakeholder berusaha mengatur hubungan perusahaan dengan seluruh pihak yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan, sehingga cakupan dan pengaruh positif dari pelaksanaan *corporate governance* bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat (Srairi, 2019). Penerapan teori stakeholder dalam *corporate governance* dapat dilihat dengan jelas pada munculnya konsep

tanggung jawab sosial perusahaan maupun green accounting yang menekankan perhatian terhadap manusia dan alam yang merupakan bentuk pengembangan dari corporate governance (Tarazi & Abedifar, 2020).

Perdebatan mengenai isu tata kelola perusahaan muncul sebagai isu besar dan menjadi pembahasan penting sejak pertengahan tahun 1980-an dan menjadi perhatian bagi para praktisi, pemegang saham, investor, pemerintah, serta akademisi. Tata kelola perusahaan tidak hanya sebagai salah satu prinsip utama dalam menjalankan perusahaan agar mencapai kinerja yang baik akan tetapi juga harus dapat memastikan bahwa kegiatan bisnis dapat terpantau dan dapat menjadi pengontrol kegiatan operasional perusahaan (Esqueda & O'Connor, 2020). Lingkungan bisnis saat ini dengan latar belakang budaya yang beragam, oleh karena itu perlu komitmen untuk mengadopsi dan menerapkan aturan yang lebih kuat untuk menghadapi perubahan yang cepat. Hal ini menyiratkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah upaya untuk mencegah perilaku yang tidak adil sesuai dengan pedoman tetapi pedoman tersebut juga digunakan sebagai kerangka pengawasan pada kondisi lingkungan bisnis yang beragam (Jan et al., 2021). Tata kelola perusahaan perlu menjadi prinsip atau pedoman, bukan menjadi sebuah aturan (OECD, 2004).

Tujuan dari penerapan tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sistem kendali perusahaan memadai dan tepat dalam memonitoring perusahaan, untuk mencegah setiap individu dari tindakan kecurangan dan skandal, untuk mengatur tata hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta memastikan bahwa perusahaan dikelola untuk kepentingan terbaik bagi pemegang saham untuk mendorong penerapan transparansi dan akuntabilitas (Alzahrani, 2019). Oleh karena itu negara-negara maju saat ini mulai memperhatikan isu tata kelola perusahaan untuk menghindari masalah ekonomi dan banyak dimulai penelitian untuk mengembangkan tata kelola perusahaan, namun sebagian besar negara-negara Islam penelitian mengenai tata kelola dan pengembangan model tata kelola perusahaan minim dilakukan. Tentu saja prinsip-prinsip Good Corporate Governance konvensional yang sekarang menjadi acuan kurang tepat jika diterapkan di lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah harus mengacu kepada prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance (Tjahjadi et al., 2021).

Saat ini UMKM didorong untuk mengikuti jalur pertumbuhan usaha yang kompleks guna meningkatkan keunggulan kompetitif mereka dengan mengikuti perkembangan teknologi yang semakin cepat (Tsafack & Guo, 2021). Perlunya pembinaan terhadap pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan literasi tentunya akan sangat terbantu. Transformasi digital dan keberlanjutan menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM. Teknologi digital mengubah lingkungan pasar, membuka tantangan baru dan sekaligus peluang bagi UMKM. Beberapa potensi dampak digitalisasi bagi UMKM mulai dari peningkatan produktivitas; peningkatan

kualitas produk; efisiensi dan efektivitas; proses pengambilan keputusan yang lebih baik; fleksibilitas yang unggul; pengurangan waktu ke pasar; inovasi model bisnis; dan yang tak kalah pentingnya adalah kepedulian kelestarian lingkungan. Peranan UMKM yang sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga pada negara-negara maju.

UMKM terbukti berperan sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran serta berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan perekonomian. Namun berkembang tidaknya UMKM pada era perdagangan bebas dan krisis pandemi misalnya, tergantung pada daya saing dan peningkatan efisiensi serta kekuatan jaringan bisnis dengan lembaga lainnya. Selain itu, pemilik atau pengelola UMKM perlu terlibat penuh dalam operasional sehari-hari karena alasan kurangnya keahlian manajemen para pengelola dibandingkan dengan keahlian manajemen perusahaan besar (Ararat et al., 2021). Terbatasnya sumber daya manusia berdampak pada penurunan kinerja UMKM seperti kurangnya literasi keuangan. Beberapa kajian teoritis dan penelitian menunjukkan temuan bahwa pemahaman yang maksimal terhadap literasi keuangan cenderung meningkatkan pertumbuhan usaha UMKM. Literasi keuangan yang lebih baik dapat memberikan manfaat bagi UMKM dalam meningkatkan permintaan akan layanan keuangan; lebih banyak tabungan; manajemen risiko yang lebih baik; peningkatan intermediasi dan percepatan pembangunan keuangan. Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan keuangan dasar lebih tepat dan efisien untuk perkembangan ekonomi dan pertumbuhan usaha UMKM. UMKM cenderung memiliki orientasi jangka pendek dalam pengambilan keputusan bisnis (Ahmadi et al., 2019).

KESIMPULAN

Peranan UMKM sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga pada negara-negara maju. UMKM terbukti berperan sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran serta berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan perekonomian. Pada era kompetisi global, UMKM diharapkan mampu memberikan nilai tambah lebih banyak pada barang atau jasa yang ditawarkan, baik secara kualitas (yang lebih baik) atau efisien (lebih tepat guna) dibandingkan pesaing. Hal ini secara spesifik sulit dilakukan oleh UMKM karena minimnya kemampuan manajemen dan pengelolaan modal kerja yang terbatas. Kondisi saat ini UMKM mengalami berbagai permasalahan seperti terjadinya penurunan penjualan, kendala akses permodalan, terhambatnya distribusi, kesulitan bahan baku, produksi menurun dan pemutusan hubungan tenaga kerja, hal ini menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. UMKM sebagai penggerak ekonomi domestik dan penyerap tenaga kerja menghadapi penurunan produktivitas yang

berakibat pada penurunan profit secara signifikan, terlebih lagi saat era pandemi covid.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A., Kerachian, R., Rahimi, R., & Emami Skardi, M. J. (2019). Comparing And Combining Social Network Analysis And Stakeholder Analysis For Natural Resource Governance. *Environmental Development*, 32(September 2018), 100451. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2019.07.001>
- Alam, N., Ramachandran, J., & Nahomy, A. H. (2020). The Impact Of Corporate Governance And Agency Effect On Earnings Management – A Test Of The Dual Banking System. *Research In International Business And Finance*, 54(June 2019), 101242. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101242>
- Almaqtari, F. A., Hashed, A. A., & Shamim, M. (2021). Impact Of Corporate Governance Mechanism On IFRS Adoption: A Comparative Study Of Saudi Arabia, Oman, And The United Arab Emirates. *Heliyon*, 7(1). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.E05848>
- Alzahrani, M. (2019). Islamic Corporate Finance, Financial Markets, And Institutions: An Overview. *Journal Of Corporate Finance*, 55(November), 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2018.11.008>
- Anwer, Z., Azmi, W., & Mohamad, S. (2021). Shariah Screening And Corporate Governance: The Case Of Constituent Stocks Of Dow Jones US Indices. *International Review Of Economics And Finance*, October. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.12.013>
- Ararat, M., Claessens, S., & Yurtoglu, B. B. (2021). Corporate Governance In Emerging Markets: A Selective Review And An Agenda For Future Research. *Emerging Markets Review*, 48, 100767. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2020.100767>
- Azmi, W., Anwer, Z., Mohamad, S., & Shah, M. E. (2019). The Substitution Hypothesis Of Agency Conflicts: Evidence On Shariah Compliant Equities. *Global Finance Journal*, 41(April 2018), 90–103. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2019.02.004>
- Chen, N., & Yu, M. T. (2021). National Governance And Corporate Liquidity In Organization Of Islamic Cooperation Countries: Evidence Based On A Sharia-Compliant Liquidity Measure. *Emerging Markets Review*, 47(October 2018), 100800. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2021.100800>

- Dewi, F., & Mahendrawathi, E. R. (2019). Business Process Maturity Level Of Msmes In East Java, Indonesia. *Procedia Computer Science*, 161, 1098–1105. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.221>
- Driss, H., Drobetz, W., El Ghouli, S., & Guedhami, O. (2021). Institutional Investment Horizons, Corporate Governance, And Credit Ratings: International Evidence. *Journal Of Corporate Finance*, 67(June 2020), 101874. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101874>
- Erragragui, E., & Revelli, C. (2016). Is It Costly To Be Both Shariah Compliant And Socially Responsible? *Review Of Financial Economics*, 31, 64–74. <https://doi.org/10.1016/j.rfe.2016.08.003>
- Esqueda, O. A., & O'Connor, T. (2020). Corporate Governance And Life Cycles In Emerging Markets. *Research In International Business And Finance*, 51(August 2019), 101077. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.101077>
- Fatmawati, D., Ariffin, N. M., Abidin, N. H. Z., & Osman, A. Z. (2020). Shariah Governance In Islamic Banks: Practices, Practitioners And Praxis. *Global Finance Journal*, 100555. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100555>
- Hashim, F., Mahadi, N. D., & Amran, A. (2015). Corporate Governance And Sustainability Practices In Islamic Financial Institutions: The Role Of Country Of Origin. *Procedia Economics And Finance*, 31(15), 36–43. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01129-6](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01129-6)
- Imamah, N., Lin, T. J., Suhadak, Handayani, S. R., & Hung, J. H. (2019). Islamic Law, Corporate Governance, Growth Opportunities And Dividend Policy In Indonesia Stock Market. *Pacific Basin Finance Journal*, 55(October 2018), 110–126. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.03.008>
- Jan, A. A., Lai, F. W., & Tahir, M. (2021). Developing An Islamic Corporate Governance Framework To Examine Sustainability Performance In Islamic Banks And Financial Institutions. *Journal Of Cleaner Production*, 315(March), 128099. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128099>
- Jewalikar, A. D., & Shelke, A. (2017). Lean Integrated Management Systems In MSME Reasons, Advantages And Barriers On Implementation. *Materials Today: Proceedings*, 4(2), 1037–1044. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2017.01.117>
- Kluza, K., Ziolo, M., & Spoz, A. (2021). Innovation And Environmental, Social, And Governance Factors Influencing Sustainable Business Models - Meta-Analysis. *Journal Of Cleaner Production*, 303, 127015. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127015>
- Kok, S. K., & Filomeni, S. (2020). The Holding Behavior Of Shariah Financial Assets

- Within The Global Islamic Financial Sector: A Macroeconomic And Firm-Based Model. *Global Finance Journal*, 100557. <https://doi.org/10.1016/J.Gfj.2020.100557>
- Li, W., Zheng, M., Zhang, Y., & Cui, G. (2020). Green Governance Structure, Ownership Characteristics, And Corporate Financing Constraints. *Journal Of Cleaner Production*, 260, 121008. <https://doi.org/10.1016/J.Jclepro.2020.121008>
- Qoyum, A., Sakti, M. R. P., Thaker, H. M. T., & Alhashfi, R. U. (2021). Does The Islamic Label Indicate Good Environmental, Social, And Governance (ESG) Performance? Evidence From Sharia-Compliant Firms In Indonesia And Malaysia. *Borsa Istanbul Review*. <https://doi.org/10.1016/J.Bir.2021.06.001>
- Resmi, S., Pahlevi, R. W., & Sayekti, F. (2021). *The Effect Of Financial And Taxation Literation On Competitive Advantages And Business Performance : A Case Study In Indonesia*. 8(2), 963–971. <https://doi.org/10.13106/Jafeb.2021.Vol8.No2.0963>
- Resmi, S., Pahlevi, R. W., & Sayekti, F. (2022). IMPROVING ENVIRONMENTAL MANAGEMENT LITERACY AND PERFORMANCE OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (Msmes) THROUGH FINANCIAL TRAINING. *Procedia Environmental Science, Engineering And Management*, 8(4), 931–938.
- Safiullah, M. (2021). Stability Efficiency In Islamic Banks: Does Board Governance Matter? *Journal Of Behavioral And Experimental Finance*, 29, 100442. <https://doi.org/10.1016/J.Jbef.2020.100442>
- Safiullah, M., Hassan, M. K., & Kabir, M. N. (2020). Corporate Governance And Liquidity Creation Nexus In Islamic Banks – Is Managerial Ability A Channel? *Global Finance Journal*, January, 100543. <https://doi.org/10.1016/J.Gfj.2020.100543>
- Samantha, G. (2018). The Impact Of Natural Disasters On Micro, Small And Medium Enterprises (Msmes): A Case Study On 2016 Flood Event In Western Sri Lanka. *Procedia Engineering*, 212, 744–751. <https://doi.org/10.1016/J.Proeng.2018.01.096>
- Srairi, S. (2019). Transparency And Bank Risk-Taking In GCC Islamic Banking. *Borsa Istanbul Review*, 19, S64–S74. <https://doi.org/10.1016/J.Bir.2019.02.001>
- Suyatmi, S., & Pahlevi, R. W. (2021). Peran Orientasi Kewirausahaan Dan Orientasi Pembelajaran Untuk Meningkatkan Kinerja UMKM. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(2), 157–168. <https://doi.org/10.15408/Ess.V11i2.21826>
- Tarazi, A., & Abedifar, P. (2020). Special Issue On Islamic Banking: Stability And Governance. *Global Finance Journal*, 100540. <https://doi.org/10.1016/J.Gfj.2020.100540>

- Tjahjadi, B., Soewarno, N., & Mustikaningtiyas, F. (2021). Good Corporate Governance And Corporate Sustainability Performance In Indonesia: A Triple Bottom Line Approach. *Heliyon*, 7(3), E06453. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.E06453>
- Tsafack, G., & Guo, L. (2021). Foreign Shareholding, Corporate Governance And Firm Performance: Evidence From Chinese Companies. *Journal Of Behavioral And Experimental Finance*, 31, 100516. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2021.100516>
- Vásquez, J., Aguirre, S., Puertas, E., Bruno, G., Priarone, P. C., & Settineri, L. (2021). A Sustainability Maturity Model For Micro, Small And Medium-Sized Enterprises (Msmes) Based On A Data Analytics Evaluation Approach. *Journal Of Cleaner Production*, 311(May). <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127692>
- Yáñez-Araque, B., Sánchez-Infante Hernández, J. P., Gutiérrez-Broncano, S., & Jiménez-Estévez, P. (2021). Corporate Social Responsibility In Micro-, Small- And Medium-Sized Enterprises: Multigroup Analysis Of Family Vs. Nonfamily Firms. *Journal Of Business Research*, 124(June), 581–592. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.10.023>